

BAB II

Gambaran Umum PLN RI terhadap Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh pada prinsip sistem politik luar negeri bebas dan aktif, yaitu politik negara yang mengandung kemerdekaan dan kedaulatan Negara serta berdasarkan pada kepentingan rakyat dan bertujuan untuk perdamaian dunia. Dalam prakteknya, salah satu bentuk hubungan Indonesia dengan negara lain adalah hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur-Tengah, seperti hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina.

Berdasarkan sejarah, hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina sudah lama terjalin, yaitu sejak masa peralihan Indonesia menuju kemerdekaan, Palestina merupakan bangsa pertama di kawasan Timur-Tengah yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia di Radio Internasional melalui Mufti Palestina yang bernama Amin Al Husaini. Berkat jasa dari Amin inilah, kemerdekaan Indonesia mendapatkan gemanya pada masyarakat Internasional. Hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina semakin baik setelah ditempatkannya Duta Besar Palestina untuk Indonesia pada 13 September 1993.

Palestina adalah bangsa yang sampai sekarang berusaha untuk mendapatkan kedaulatan di dunia Internasional, konflik agama dan politik yang terjadi selama bertahun-tahun antara Israel dengan warga Palestina telah menjadikan Palestina terpecah menjadi dua wilayah kekuasaan,

yaitu: wilayah Tepi Barat (West Bank) yang dikuasai oleh partai Fatah dan wilayah Jalur Gaza (Gaza Strip) yang dikuasai oleh partai Hamas.

Berdasarkan sifat politik internasional Indonesia yang bebas dan aktif yang bertujuan untuk perdamaian dunia dan kesamaan beberapa hal tersebut, mendorong Indonesia untuk melakukan langkah inisiatif guna berperan dalam membantu penanganan korban agresi dan proses pencapaian perdamaian antara Palestina dengan Israel. Kemerdekaan Palestina bukanlah pilihan politik luar negeri Indonesia. Namun hal ini sudah merupakan keharusan karena adanya amanah konstitusi. Ada sisi lain, di mana konflik Israel-Palestina juga tidak begitu kunjung selesai, tercatat pada kurun 2007-2008, Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) Tidak Tetap PBB. Hal ini memberikan keuntungan Indonesia dalam konteks sebagai wadah untuk mengekspresikan politik luar negeri dan diplomasinya.

Posisi Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina yang secara jelas menyebutkan bahwa perdamaian harus tercapai di Timur Tengah dengan memberi kemerdekaan penuh kepada Palestina, menjadikan posisinya di DK PBB dalam menangani isu perdamaian ini lebih strategis dari pada peran sebelumnya. Keanggotaan Indonesia di DK PBB diwarnai dengan aktifnya diplomasi Indonesia dalam usaha-usaha penyelesaian masalah konflik Palestina-Israel. Indonesia memandang konflik Israel-Palestina dengan perhatian tersendiri. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, 206.635.753 orang (87% total penduduk) dan

pernah mengalami jajahan, Indonesia memiliki rasa perhatian yang tinggi untuk membantu Palestina yang juga mayoritas muslim.

Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dari pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Bangsa Palestina adalah bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Negara Indonesia yaitu pada tanggal 6 September 1944 sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh seorang mufti besar Palestina, Amin Al-Husaini.

Syeh Muhammad Amin Al-Husaini juga mendesak negara-negara Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga berhasil meyakinkan Mesir dan kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi dan Afganistan. Jadi sebelum Mesir, Palestina adalah bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, hal ini dikutip dari sebuah buku berjudul “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri” yang ditulis oleh M. Zein Hassan Lc.¹ Dengan melihat kembali sejarah, Indonesia mempunyai hutang budi dalam pendudukan kemerdekaan Bangsa Palestina. Berikut ini akan diuraikan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Bangsa Palestina secara lebih rinci dari pembahasan sebelumnya pada era Presiden-Presiden Indonesia.

¹<https://www.satuIslam.org/umum/palestina-negara-pertama-yang-mengakui-kemerdekaan-indonesia/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 10.32 WIB.

A. Dukungan RI di bawah Pemerintahan Presiden Soekarno

Presiden Soekarno terus mendukung perjuangan kemerdekaan Bangsa Palestina dengan menolak hubungan dengan Israel dan dengan tegas mengatakan bahwa selama Palestina belum merdeka maka selama itu Indonesia akan terus mendukung Palestina. Salah satu bentuk dukungan Soekarno pada saat itu yaitu, pada tahun 1955 Soekarno mengundang Mufti Jerussalem Haji Al-Amin Al-Hussein pada Konferensi Asia Afrika di Bandung dan tidak mengundang Israel. Soekarno juga tidak mengundang Israel untuk ambil bagian dalam *Games Of the New Emerging Forces* (Ganefo) di Jakarta tahun 1962. Selain itu, RI juga mengirim berbagai bantuan kemanusiaan untuk Rakyat Palestina.

Sebagai sesama negara muslim, Soekarno berusaha mendekati Palestina dengan jalan menjalin hubungan kedua negara, karena seperti diketahui bahwa Palestina adalah musuh dari negara-negara blok barat. Dengan terciptanya hubungan kedua negara, Soekarno berharap dapat menjadikan Palestina sebagai rekan dan kekuatan baru dalam melawan negara-negara blok barat yang sedang mengincar dirinya.

Pemerintah Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Sukarno secara khusus mendukung eksistensi Masjid Al Aqsha. Pada Tahun 1965, melalui perantara menteri agama, KH Saifuddin Zuhri, turut membantu

pemugaran Masjid Al Aqsha. Indonesia menyumbang \$ 18.000 yang disampaikan kepada Menteri Urusan Waqaf Kerajaan Yordania.²

B. Dukungan RI di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto

Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Realisasi dari dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan diplomatik, yaitu pengakuan terhadap keputusan Dewan Nasional Palestina (Palestinian National Council) untuk memproklamasikan Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988.

Dukungan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara Pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Di samping itu, Indonesia adalah anggota Committee on Al-Quds (Yerusalem) yang dibentuk pada tahun 1975. Indonesia juga mendorong OKI untuk tetap mendukung penyelesaian politik konflik Palestina secara adil.

Pada Pemerintahan Soeharto langkah konkrit yang ditunjukkan yaitu Soeharto mengizinkan pembukaan perwakilan PLO di Jakarta pada tahun 1989. Soeharto juga mengundang Yaser Arafat pada KTT-Non Blok di Jakarta pada tahun 1992 dan disusul dengan bantuan kemanusiaan.

Dalam pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Yasser Arafat tersebut, Yasser meminta dukungan Indonesia terhadap pendirian negara

²www.republika/soekarno/dan/bantuan/ke/palestina.html Diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 14.23 WIB.

Palestina. Soeharto memberikan dukungan kepada Palestina. Maka pada tahun 1989 hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina mulai akrab ditandai dengan berdirinya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Setelah Kedutaan besar dibuka di Jakarta, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyatakan Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara selama Israel tidak menyelesaikan permasalahannya dengan negara-negara di Timur Tengah. Ali Alatas sangat gigih memperjuangkan Palestina untuk merdeka. Ali Alatas sangat tegas menolak hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel untuk konstruksi hubungan diplomasi dan dukungan Indonesia terhadap Palestina pada masa pemerintahan Soeharto.

C. Dukungan RI di bawah Pemerintahan BJ. Habibi

Presiden BJ.Habibi merupakan presiden kelima Indonesia yang menjabat di Indonesia tahun 1998-1999. Pada saat pemerintahan BJ. Habibi tidak ada peningkatan hubungan Indonesia dan Palestina. Hal ini menjadi maklum karena singkatnya masa pemerintahan BJ.Habibi tersebut.

D. Dukungan RI di bawah Pemerintahan Abdur Rahman Wahid

Berbeda dengan presiden sebelumnya yang menentang hubungan Indonesia dengan Israel karena alasan dukungan terhadap Palestina, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mempunyai pandangan yang berbeda. Gus Dur memberikan sebuah wacana dengan rencana melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, yangmana di Negara Indonesia sendiri cukup menjadi sebuah wacana yang kontroversial.

Strategi ini sebenarnya adalah sebuah cara Gus Dur untuk dapat mendekati Israel dan mempengaruhi kebijakan Israel terhadap Palestina, bukan sebuah upaya pendukung Gus Dur terhadap Israel seperti asumsi yang diyakini orang awam pada umumnya.

Israel menurut pandangan Gus Dur merupakan suatu negara yang mempengaruhi pengaruh yang besar dalam peta ekonomi dunia. Selain sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina, Israel merupakan negara yang mempunyai sayap-sayap ekonomi yang kuat seperti halnya China. Oleh sebab itu Gus Dur mempunyai niat untuk membangun ekonomi dalam negeri dengan melakukan hubungan kerjasama dengan Israel, baik secara diplomatik ataupun hubungan dagang. Tetapi Gus Dur harus memahami muslim di tanah air yang anti Israel, karena alasan tersebut maka kontroversi tersebut haruslah terhenti.

Langkah yang dilakukan Gus Dur selanjutnya yaitu Gus Dur bergabung dengan organisasi Simon Peres pada tanggal 7 Maret 1997.³ Hal ini adalah langkah serius Gus Dur dalam upaya rekonsiliasi Palestina-Israel. Simon Peres sendiri adalah seorang tokoh politikus Israel yang menjabat sebagai Presiden Israel yang ke-9 (2007-2014) dan pernah menggagas kesepakatan damai dengan Palestina pada tahun 1990.⁴

Simon Peres merupakan sosok yang moderat daripada koleganya di partai Likud yang cenderung menghalalkan segala cara untuk

³Fahri Hamza,ed.,Inilah Satu Dekade Kontroversi: Tabel-Tabel Kontroversi Abdurrahman Wahid Periode 1991-2000, Jakarta: YFIS Press, 2000 hal.25

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peris diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 10.12 WIB.

mengenyahkan Palestina. Peres merupakan sosok yang dapat diterima oleh Bangsa Arab karena pandangannya yang solutif dalam menghentikan pertikaian antara dua bangsa Ibrahim tersebut.⁵ Pada saat itu, Peres sendiri yang menyeleksi para tokoh-tokoh dunia yang mempunyai komitmen tinggi dalam menciptakan perdamaian dunia. Gus Dur dinilai Peres sebagai sosok yang gandrung akan cita-cita perdamaian melalui jalur agama.⁶ Oleh sebab itu, kontribusi Gus Dur sangat dibutuhkan di yayasan tersebut. Terlihat persamaan yang kentara terkait ide pengentasan konflik Palestina dan Israel antara Peres dan Gus Dur, keduanya memandang suatu persamaan baik hak dan kewajiban bagi Bangsa Yahudi dan Arab Palestina.

Pendekatan Gus Dur ke Israel adalah sebuah cara Gus Dur untuk mencoba merangkul Israel dengan paradigma merubah lawan menjadi kawan, dengan harapan Gus Dur dapat melakukan lobby dan mempengaruhi kebijakan Israel terhadap Palestina. Walaupun merupakan cara yang solutif, tetapi kita tidak bisa lepas dari pandangan muslim tanah air yang begitu anti Israel yang dianggap sebagai musuh Islam, karena dalam kenyataannya, Israel terus memerangi Bangsa Palestina. Selain itu, melihat posisi Gus Dur yang sebagai presiden akan menimbulkan resiko yang besar, Indonesia yang bermayoritas penduduk muslim akan dipandang dunia Islam di negara-negara lain berpindah mendukung Israel

⁵Reza Sihbudi.1999.*Menyandera Timur Tengah*. Jakarta : Gema Insani.hal 32.

⁶Nawawi A. Manan. 2000. *Membangun Demokrasi*. Jakarta : Medina Pustaka. hal 166

yang bermula mendukung Palestina. Indonesia yang pernah menderita dijajah malah mendukung negara yang menjajah bangsa lain.⁷

Pada tanggal 29 Desember 2008, Gus Dur memberikan tanggapan terhadap serangan Israel yang terus menerus dalam pernyataannya dalam siaran persnya yang berjudul “Hentikan Serangan terhadap Palestina” yaitu:

1. Mengecam segala bentuk dan cara kekerasan dalam menyikapi kebuntuan politik dan penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina
2. Mendesak pihak militer Israel untuk menghentikan serangan dan mundur dari wilayah Palestina (khususnya jalur Gaza)
3. Menuntut agar pihak-pihak pemerintah di Palestina mulai dari PLO, Otoritas Palestina dan Fatah di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas untuk tidak berpangku tangan dan membiarkan serangan Israel ini, apalagi memandang serangan Israel itu hanya sebagai urusan Hamas saja
4. Menuntut agar pihak Hamas meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyikapi konflik Palestina-Israel, agar kaum konservatif Israel tidak menjadikannya sebagai dalih untuk melakukan pembalasan. Hamas perlu kembali pada perjuangan diplomatik dan perundingan bukan dengan jalur kekerasan yang akan menjadikan rakyat Palestina sebagai korban

⁷Mahfudz.1996. *Mencari Damai yang Dimusuhi, Catatan Perjalanan ke Israel*. Jakarta: Ufuk Press. hal 27 dan 28.

5. Meminta umat Islam di Indonesia untuk memberikan bantuan semampunya untuk rakyat Palestina dari doa (seperti membaca doa *qunut nazilah* bagi umat Islam), dan bentuk-bentuk bantuan lainnya
6. Meminta umat Islam di Indonesia untuk terus waspada agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha ‘menunggangi’ isu Palestina ini yang tujuannya demi kepentingan kelompoknya sendiri.⁸

E. Dukungan RI di bawah Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Menurut Megawati implementasi dari nilai UUD 1945 dan falsafah Pancasila harus diwujudkan, salah satunya yaitu dengan membela perjuangan Rakyat Palestina yang telah banyak menjadi korban untuk mempertahankan tanah airnya. Pengorbanan Rakyat Palestina menurut Megawati mirip dengan perjuangan Bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Untuk itulah dirinya mengharapkan Bangsa Indonesia tidak boleh menyerah dalam membela perjuangan Bangsa Palestina.

Presiden Megawati disamping memberikan pidatonya di Sidang Umum PBB juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS, George W. Bush membahas proses perdamaian di Timur Tengah. Megawati mengecam terhadap segala bentuk terorisme dalam bentuk apapun, sulit menghilangkan pandangan muslim dunia bahwa kebijakan terhadap Timur Tengah bukan saja tidak adil, tapi juga sepihak, yakni

⁸http://www.wahidinstitute.org/v1/Jaringan/Detail/?id=79/hl=id/Gus_Dur_Kecam_Serangan_Israel diakses tanggal 20 Oktober 2016 pukul 11.14 WIB.

mendukung Israel. Ketidak adilan inilah yang menurut Presiden Megawati menjadi sumber timbulnya kekerasan.

Selain dukungan Megawati yang ditunjukkan melalui pidato resmi di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pentingnya konflik Palestina-Israel untuk segera diakhiri demi terwujudnya perdamaian di Timur Tengah, pada masa pemerintahan Megawati sama halnya dengan pemerintahan masa BJ.Habibi, yaitu tidak ada tindakan yang berarti dalam peningkatan hubungan Indonesia dan Palestina. Hal ini dikarenakan masa kepemimpinan Presiden Megawati lebih memperhatikan pada keadaan dalam negeri, seperti mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat. Sehingga tidak ada tindakan konkrit dalam upaya pendudukan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina di bawah Pemerintahan Presiden Megawati.

F. Dukungan di bawah Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada tanggal 20 Oktober 2004 sebagai awal dimulainya pemerintahan SBY, dukungan Indonesia terhadap Palestina tetap berlangsung sebagai prioritas dalam politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut dapat tercermin dari kunjungan perdananya ke luar negeri untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin PLO, Yasser Arafat, di Mesir, pada Bulan November 2004.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada awal masa kepemimpinannya, mengatakan bahwa membantu proses pencapaian perdamaian di Timur Tengah merupakan batu pertama politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinannya. Perdamaian ini menurutnya hanya akan dicapai apabila Palestina diberi kebebasan untuk merdeka. Pada pertemuan dengan 119 diplomat yang mewakili Indonesia di 85 negara pada 13 Desember 2004, SBY berpidato:

“I asked the diplomats to be more proactive, and to keep searching for an opportunity to contribute to the Middle East peace process, particularly in the case of Palestine. I know it is not easy to find an entry point to get involved in the peace process, and the problem is also very complicated. But I am sure there is always a chance as long as we are proactive in examining this matter. We are sure that peace in the (Middle East) region can be achieved if the Palestinian’s right to freedom is fulfilled.” (The Jakarta Post, 14/12/2004)

Posisi Indonesia dalam masalah Israel-Palestina secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 242 (1967) dan Resolusi DK-PBB No. 338 (1973), yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan al-Quds as-Syarif (Jerusalem Timur) sebagai ibukotanya, di bawah prinsip *“land for peace”*. Indonesia mendukung upaya perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan baik oleh PBB maupun OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang dihasilkan diantaranya pada Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al

Sheikh (1999), serta Peta Jalan Perdamaian (*Road Map*) gagasan quartet AS, Russia, PBB dan UE. Indonesia percaya bahwa Palestina dapat merdeka dengan menjalankan hasil-hasil resolusi dan konferensi ini.

Indonesia juga mendorong persatuan Bangsa Palestina melalui rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Dalam kunjungannya ke Indonesia bulan Oktober 2007, Presiden Mahmoud Abbas telah mengulangi usulannya agar Indonesia berpartisipasi pada Konferensi Annapolis 27 November 2007 tentang Timur Tengah serta menyambut baik rencana Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika untuk peningkatan kapasitas Palestina pada pertengahan pertama tahun 2008.

Ketika gejolak terus terjadi sampai pada minggu ketiga agresi Israel tepatnya 10 Januari 2009, presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menelepon Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, selain menyatakan apresiasi atas peran Perancis sebagai salah satu anggota DK PBB yang aktif dan riil mencari solusi, SBY juga mengharapkan Perancis bersama-sama dengan Indonesia berupaya lebih serius mendesak Israel untuk menghentikan serangannya dan menarik mundur pasukannya dari wilayah Palestina.

Pemerintah Indonesia ketika itu meminta dilaksanakan Sidang Darurat Majelis Umum PBB untuk membahas serangan ke Gaza. Indonesia juga menawarkan diri sebagai monitoring PBB untuk memantau sikap Israel dalam mematuhi resolusi DK PBB. Pada intinya, Indonesia akan mendesak PBB mengeluarkan resolusi atau mekanisme baru yang

bisa dijalankan penuh serta dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat konflik di Palestina. Pendekatan yang dilakukan Indonesia memang lebih bersifat Humanisme, bukan secara ekstrim.

Indonesia bersama-sama dengan Afrika Selatan, telah menyelenggarakan *New Asia-Africa Strategic Partnership Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* di Jakarta pada tanggal 14-15 Juli 2008 guna mendukung terwujudnya negara Palestina yang *viable*, dan menghasilkan sejumlah komitmen bantuan teknis, termasuk pelatihan bagi 10.000 warga Palestina di berbagai bidang oleh negara-negara peserta konferensi. Indonesia sendiri berkomitmen untuk memberi pelatihan pada 1.000 warga Palestina untuk periode 2008-2013. Sejauh ini Indonesia telah melatih lebih dari 449 aparatur dan warga Palestina di berbagai bidang termasuk manajemen proyek infrastruktur publik, keterampilan industrial, dan lain sebagainya.⁹

Indonesia juga memberikan bantuan keuangan kepada Palestina melalui *Paris Donor Conference 2007*, sewaktu terjadi krisis Gaza 2008-2009 dan juga melalui *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA). Indonesia juga mengalokasikan dana sejumlah Rp. 20 milyar untuk membangun *cardiac center* pada Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, Palestina.¹⁰

⁹ <https://jurnalhiuns.files.wordpress.com/2017/01/capacity-building-kerjasama-selatan-selatan-dan-triangular-indonesia-kepada-palestina-pada-tahun-2005-2014.pdf> diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 14.36 WIB.

¹⁰<http://nasional.kompas.com/read/2010/05/29/18385956/RI.Bangun.Rumah.Sakit.Rp.20.M.di.Gaza> diakses pada tanggal 09 Desember 2016 pukul 12.41 WIB

Terkait dengan serangan Israel ke Gaza pada pertengahan November 2012, Pemerintah Indonesia mengikuti secara seksama dan dengan penuh keprihatinan situasi di Jalur Gaza, Palestina menyusul serangkaian aksi militer Israel. Indonesia mendesak seluruh pihak untuk dapat menahan diri dari aksi-aksi lanjutan sehingga tidak memperburuk situasi dan mengakibatkan korban di kalangan rakyat sipil yang tidak berdosa. Untuk itu, Pemerintah menyerukan agar DK PBB, sesuai mandat di bawah piagam PBB, segera mengambil langkah lebih konkrit untuk meredakan situasi di kawasan.

Indonesia telah berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya pemberdayaan masyarakat Palestina melalui proyek pembangunan kapasitas yang dilakukan di bawah payung *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP). Selama Januari-Oktober 2011, telah terlaksana implementasi komitmen pembangunan kapasitas bagi Palestina oleh Kementerian dan Lembaga sebanyak 16 program bagi 104 peserta Palestina. Dengan demikian, sejak 2008, Pemerintah RI telah melaksanakan 47 pelatihan yang diikuti oleh 235 peserta. Program tersebut akan terus dilanjutkan sesuai dengan komitmen Pemerintah RI hingga mencapai total 1.000 orang peserta, dalam durasi program yang akan berlangsung antara tahun 2008 - 2013. Selain itu, KBRI Kairo telah menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza, 2 Januari 2011, melalui Bulan Sabit Merah Palestina.

Bantuan kemanusiaan berupa peralatan medis senilai USD 83.325,21 yang berasal dari Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan, sisa bantuan kemanusiaan dari Kementerian Kesehatan Menlu RI dan Menlu Palestina pada Peringatan 50 tahun GNB, Bali, 23 – 27 Mei 2011 RI pada Januari 2009, dan sumbangan masyarakat Indonesia di Mesir.

Isu Palestina sepanjang tahun 2014 diwarnai oleh perang selama 53 hari di Gaza, serta Yahudisasi dan serbuan kelompok ekstrimis Israel terhadap kompleks Masjid Al Aqsha di Yerusalem. Namun, dukungan Pemerintah RI terhadap Palestina tidak pernah berhenti. Selain turut aktif dalam berbagai resolusi yang terkait dengan Palestina di berbagai forum regional dan internasional, Pemerintah RI juga aktif mendukung pembangunan Palestina dengan menjadi tuan rumah dalam CEAPAD II di Jakarta pada bulan Maret 2014 dan memberikan bantuan pembangunan SDM melalui skema pembangunan kapasitas. Pemerintah RI juga telah menyampaikan bantuan sebesar USD 1 juta kepada Pemerintah Palestina guna rekonstruksi Gaza pasca perang 53 hari.

Disamping bantuan kemanusiaan, tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY yaitu mendorong masuknya Palestina dalam keanggotaan Inter Parliamentarian Union (IPU) pada Oktober 2008 dan juga mengecam aksi militer Israel ke Gaza dalam rangka sidang HAM ke-9 pada Januari 2009.

G. Dukungan RI di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Era Presiden Joko Widodo dengan adanya KTT Luar Biasa OKI adalah Pembuktian Janji Jokowi Soal Palestina. Jokowi menyatakan bahwa dunia Islam yang terwakilkan dalam OKI harus tegas mendorong kemerdekaan Palestina yang hakiki, yaitu mendesak Israel keluar dari tanah-tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948 dan mendesak dunia internasional memberikan sanksi terhadap Israel atas kejahatan kemanusiaan.

KTT OKI yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Maret 2016 merupakan KTT Luar Biasa ke-5 yang diadakan OKI. Dinamakan Luar Biasa karena konferensi ini akan dilakukan di luar jadwal konferensi tiga tahunan OKI yang seharusnya dilaksanakan pada 15-16 April 2016 di Turki. Namun Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI saat pertemuan OKI di Al Jazair meminta agar digelar KTT Luar Biasa dengan agenda khusus masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Enam isu yang dibahas dalam KTT Luar Biasa OKI dengan tema “*United For A Just Solution*” yaitu masalah perbatasan Palestina yang terus dianeksasi Israel, nasib para pengungsi Palestina, status Yerusalem Timur, pemukiman ilegal warga Israel di Palestina, keamanan dan akses terhadap air bersih.¹¹ OKI Luar Biasa ke-5 ini merupakan KTT pertama yang mengangkat secara khusus isu Palestina dan Al-Quds Al-Syarif.

Penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI tahun 2016 di Indonesia merupakan bukti komitmen Pemerintah RI untuk mewujudkan perdamaian

¹¹[http://www.hidayatullah.com/kajian/KTT OKI LUAR BIASA.html](http://www.hidayatullah.com/kajian/KTT_OKI_LUAR_BIASA.html) diakses pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 09.34 WIB.

dunia. Pelaksanaan KTT juga merupakan tindak lanjut dari momentum yang diciptakan oleh Pemerintah RI sepanjang tahun 2015 dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, yaitu Deklarasi Palestina yang dihasilkan pada Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika pada bulan April 2015, dan penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Jerusalem Timur pada Bulan Desember 2015.

Pada tanggal 9 Februari 2016, dilakukan pertemuan segitiga Indonesia, Palestina dan Setjen OKI yangmana untuk mempersiapkan KTT OKI dengan Agenda 6 Maret 2016 sebagai pertemuan tingkat pejabat tinggi (SOM) yang dilanjutkan dengan pertemuan tingkat tinggi menteri luar negeri. Sedangkan konferensi dilaksanakan 7 Maret 2016. Upaya itu merupakan bagian upaya mengingatkan kembali negoisasi mengenai Al Quds yang sudah terhenti sejak Mei 2015. Pada mulanya KTT itu diselenggarakan di Maroko, namun Maroko menyatakan ketidaksiapan. Kemudian Indonesia diminta menjadi tuan rumah mengganti Maroko.

Dengan kesiapan Indonesia menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI di satu sisi juga menunjukkan bahwa Indonesia konsisten mendukung Palestina. Indonesia telah sukses menyelenggarakan KTT Asia Afrika pada tahun 2015. Tentu penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI ini akan menjadi peluang untuk membuktikan peran Indonesia.¹²

Perkembangan terakhir dukungan Pemerintah RI dalam masa Pemerintahan Jokowi yaitu Indonesia mendukung Rosulusi Dewan

¹²<http://www.nu.or.id/post/read/66225/jangan-lupakan-palestina> diakses pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 11.09 WIB.

Keamanan PBB yang disahkan pada tanggal 23 Desember 2016. Resolusi tersebut merupakan resolusi yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti permukiman ilegal Israel yang dibangun di Wilayah Palestina yang bertempat di Tepi Barat, Gaza dan Al-Quds Timur.¹³

Indonesia berpendapat disahkannya resolusi tersebut sangat tepat waktu di tengah mulai tergesernya perhatian internasional terhadap Palestina dari agenda global. Isu Pemukiman ilegal Yahudi yang dibangun sejak tahun 1967 selama ini memang tidak memiliki legalitas hukum dan merupakan pelanggaran hukum internasional serta menjadi hambatan utama tercapainya solusi dua negara. Dengan Resolusi PBB yang menyerukan Israel untuk menghentikan segala bentuk aktifitas pembangunan perumahan Yahudi, merupakan satu langkah maju penyelesaian konflik Israel-Palestina dan Indonesia yang sejak dahulu mendukung Kemerdekaan Palestina menyatakan siap membantu bersama dengan masyarakat internasional dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

¹³<http://beritaIslamMina-Indonesia-apresiasi-baik-resolusi-DK-PBB-pemukiman-Ilegal-Israel.html> diakses pada tanggal 8 Januari 2017 pukul 13.26 WIB.

